



Naskah AKHIR
14 Agustus 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2014**

JUM'AT, 15 AGUSTUS 2014
Pukul: 14.30 WIB

ACARA:

1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan Sidang I Tahun Sidang 2014.
2. Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

**Kedatangan Presiden dan Wakil Presiden RI didampingi oleh
Pimpinan DPR-RI**

PEMBAWA ACARA:

1. Presiden dan Wakil Presiden didampingi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD memasuki Ruang Rapat Paripurna.
2. Hadirin dimohon berdiri.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

PEMBAWA ACARA:

Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- Saudara Presiden Republik Indonesia,
- Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,
- Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,
- Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-RI,
- Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara,
- Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
- Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,

Dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, mengawali sidang ini, saya selaku Pimpinan Sidang mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita kembali hadir pada Rapat Paripurna DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014.

Rapat Paripurna DPR-RI yang juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI siang hari ini, memiliki dua agenda, yaitu: *pertama*, Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014, dan *kedua*, Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Kehadiran seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI dalam agenda Sidang Paripurna DPR-RI hari ini, adalah berkenaan dengan peran dan pertimbangan DPD-RI atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR-RI, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak

Anggota Dewan, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, kami membuka Rapat Paripurna DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Selanjutnya, izinkan kami memberitahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat, beberapa surat masuk yang diterima oleh Pimpinan DPR selama Masa Reses yang lalu. *Pertama*, surat dari Presiden RI tertanggal 15 Juli 2014 dan tertanggal 21 Juli 2014 tentang Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara sahabat untuk Republik Indonesia. *Kedua*, surat dari Komisi Yudisial tertanggal 17 Juli 2014 tentang Pengajuan Nama Calon Hakim Agung tahun 2014. *Ketiga*, surat dari DPD RI

tertanggal 21 Juli 2014 perihal penyampaian RUU tentang Kelautan. *Keempat*, surat-surat dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Gerindra tentang usulan perubahan Tata Tertib DPR-RI. Surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Pada Masa Persidangan I ini Dewan akan melaksanakan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, serta tugas-tugas lain yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hari ini Sidang Dewan akan mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Pada Masa Persidangan IV

yang lalu, DPR dan Pemerintah telah melakukan proses penyusunan RAPBN 2015 melalui mekanisme Pembicaraan Pendahuluan.

Dalam Pembicaraan Pendahuluan tersebut, DPR dan Pemerintah telah menyepakati angka-angka asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta Rencana Kerja Pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2015. RAPBN 2015 memiliki makna khusus. Selain merupakan APBN transisi yang hanya memuat *baseline* dan memberikan ruang bagi pemeritahan baru nantinya untuk melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan visi dan misinya, juga merupakan APBN pertama paska putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pembatalan kewenangan DPR dalam membahas RAPBN sampai dengan rincian kegiatan dan jenis belanja. Dewan mengharapkan, perubahan format RAPBN tidak mengurangi kualitas pembahasan DPR guna mewujudkan APBN sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2015 mendatang adalah "Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan". Sedangkan strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional, agar memenuhi aspek keadilan, dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Dewan mengingatkan kepada Pemerintah agar benar-benar dapat menjalankan amanat undang-undang, bahwa Pemerintah harus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, yang tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran, serta memperkecil kesenjangan sosial.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan program pembangunan. Sebagai instrumen fiskal yang bersifat tahunan, maka APBN bukan merupakan hasil akhir dan tujuan akhir, tetapi sebuah rencana yang dalam realisasinya perlu terus mendapat perhatian, monitoring, dan pengawasan terutama dari DPR-RI dan DPD-RI untuk memastikan bahwa arah, tujuan, prioritas dan target pembangunan serta alokasi anggaran Pusat dan Daerah, tepat guna, tidak menyimpang, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dewan melihat bahwa politik anggaran harus tetap bersandar pada tujuan pembangunan nasional yakni untuk kemakmuran rakyat banyak. Dewan juga senantiasa cermat melihat dan berupaya agar postur dan struktur APBN harus sehat dan berkesinambungan dengan

beberapa indikator seperti: *pertama*, defisit anggaran yang terkendali menuju keseimbangan atau surplus, *kedua*, keseimbangan primer yang harus terjaga positif, dan *ketiga*, rasio utang luar negeri terhadap PDB harus cenderung menurun.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Dalam rangka RAPBN 2015, DPD-RI memberikan penekanan strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah pendekatan kewilayahan yang mengutamakan pengembangan potensi daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah.

Dalam pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh tingkat inflasi yang rendah, mampu menurunkan persentase tingkat kemiskinan. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada RAPBN-P 2014, target penurunan angka kemiskinan kemungkinan tidak akan

tercapai tanpa ada upaya yang tuntas dan terpadu dalam mengatasi akar masalah kemiskinan.

Dalam hal pendapatan negara, Pemerintah harus bersungguh-sungguh menuntaskan reformasi perpajakan untuk menghindari kebocoran akibat penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pajak maupun pembayar pajak. Untuk itu, perlu dibuat regulasi dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Dalam hal kebijakan belanja, pola alokasi belanja subsidi agar dilakukan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945. Subsidi masih diperlukan dan dialokasikan pada bidang-bidang strategis, seperti infrastruktur, pertanian dan UMKM. Bidang strategis lainnya, besaran alokasinya telah ditetapkan dalam ketentuan UU agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Subsidi diberikan secara langsung kepada orang miskin dan bukan kepada kegiatan.

Pemerintah perlu menata kembali pengelolaan dana transfer ke daerah, baik sasaran maupun mekanismenya, sehingga dirasakan manfaatnya bagi daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan daerah yang tertinggal. Dengan demikian, dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produktifitas, efisiensi, serta nilai tambah dan daya saing daerah. DPD juga mengharapkan bahwa kenaikan dana transfer daerah harus lebih besar dari kenaikan belanja kementerian/lembaga, agar sejalan dengan semangat otonomi daerah.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Salah satu isu yang senantiasa mengemuka dalam setiap pembahasan RAPBN dari tahun ke tahun adalah mengenai besarnya alokasi anggaran untuk Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagaimana kita ketahui bersama

dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, alokasi belanja subsidi BBM mencapai 17,84 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa angka yang begitu besar tersebut berimplikasi terhadap semakin beratnya beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Beban tersebut menjadi semakin berat, jika kita memperhatikan bahwa besaran subsidi tersebut tidak bisa terlepas dari volatilitas nilai tukar rupiah dan pergerakan harga komoditas BBM di pasar global. Disisi lain juga menunjukkan, bahwa kebijakan subsidi BBM yang selama ini diterapkan tidak tepat sasaran atau lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas dibandingkan rakyat miskin yang semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, upaya pemerintah yang berorientasi jangka panjang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan.

Upaya pengendalian dan pembatasan yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir ini hanyalah solusi yang bersifat jangka pendek. Kebijakan yang berorientasi jangka panjang seperti mengurangi beban subsidi melalui kebijakan kenaikan harga BBM secara bertahap dengan diikuti berbagai kebijakan mitigasi serta percepatan pengembangan, baik produksi maupun penggunaan energi alternatif merupakan pilihan yang bisa dijalankan oleh pemerintah di tahun ini dan tahun yang akan datang. Namun, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif, terencana dan terukur terlebih dahulu kepada masyarakat.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Mengingat Dewan akan mengakhiri Masa Bhakti Periode 2009-2014 pada 30 September 2014, maka Dewan akan segera membahas secara intensif RAPBN Tahun Anggaran 2015, dengan tetap dalam ketelitian dan kecermatan, termasuk mempertimbangkan masukan-masukan dari DPD-RI.

Dalam Masa Persidangan I ini pun, Dewan akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang sudah dilaksanakan Masa Persidangan IV untuk memenuhi ketentuan konstitusional dalam Pasal 23E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Terkait pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan menyadari bahwa capaian legislasi masih sangat rendah. Ada 68 (enampuluh delapan) RUU yang masuk dalam daftar RUU Prioritas Tahun 2014. DPR sebenarnya sudah membuat beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja legislasi, misalnya sejak tahun 2010 DPR memberlakukan hari legislasi. Dua hari dalam satu pekan, ditetapkan sebagai hari khusus untuk membahas RUU. DPR juga telah bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk membantu penyelesaian penyusunan RUU.

Banyak kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target legislasi, antara lain belum optimalnya kinerja para Anggota Dewan dan Pemerintah dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU. Oleh karena itu, dalam sisa waktu masa bhakti DPR-RI yang tinggal sebentar lagi, komitmen dan perhatian Dewan masih diharapkan dalam penanganan RUU dengan tetap mengutamakan kualitas UU yang dihasilkan. Sinergi antara Pemerintah dengan DPR dalam proses legislasi harus lebih ditingkatkan, karena RUU yang tidak selesai pembahasannya pada masa bakti DPR-RI saat ini tidak dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPR berikutnya.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam hal fungsi pengawasan, Dewan masih akan meminta perhatian berkaitan dengan masih tingginya angka kecelakaan dengan ratusan korban meninggal dan luka-luka sepanjang arus mudik dan arus balik lebaran 2014. Berbagai kebijakan dan upaya harus terus menerus dilakukan Pemerintah dengan segenap perangkatnya,

termasuk aparat kepolisian, agar angka kecelakaan yang merupakan musibah tahunan ini dapat ditekan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu menjadi catatan Pemerintah.

Di sisi lain, pasca Idul Fitri, kota besar seperti DKI Jakarta menjadi daya tarik sendiri bagi para pendatang baru untuk melakukan urbanisasi. Setiap tahun peningkatan jumlah pendatang baru selalu terjadi. Hal ini akan memicu terjadinya masalah sosial baru seperti peningkatan jumlah pengangguran dan tingkat kriminalitas di kota besar. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masih belum meratanya pembangunan di daerah. Dewan menghimbau agar pemerintah pusat dan daerah tetap memberikan perhatian terhadap daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud di seluruh Indonesia.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Pada DPR Periode 2009-2014, kami berusaha untuk melakukan penguatan kelembagaan, baik berkaitan dengan kedewanan maupun sekretariat jenderal sebagai lembaga pendukung. Untuk itu DPR-RI telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPR-RI 2010-2014, sebagai pedoman kerja kelembagaan yang memuat langkah langkah strategis dan program rinci untuk membangun Lembaga DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang amanah, kredibel dan demokratis. Untuk mengimplementasikan Renstra tersebut, memerlukan perjuangan yang cukup panjang dan penuh tantangan. Saat ini, pelaksanaan Renstra sudah dalam tahap akhir penyelesaian, khususnya berkaitan dengan restrukturisasi kesekjenan. Namun, kita masih menunggu persetujuan dan proses lebih lanjut oleh Pemerintah.

Apabila, restrukturisasi kesekjenan ini dapat diselesaikan, maka DPR yang akan datang, sudah akan didukung dengan suprastruktur dan infrastruktur yang lebih baik dan lebih profesional. Namun demikian, kalau

restrukturisasi kesekjenan ini tidak segera diselesaikan, maka DPR yang akan datang akan memulai dari awal lagi. Kami mengkhawatirkan, apakah DPR periode yang akan datang akan dapat melanjutkan agenda besar tersebut, sebagai langkah strategis penguatan kelembagaan DPR sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Di dalam forum ini, izinkan kami menyampaikan rencana kerja berkaitan dengan diplomasi parlemen. Diantaranya, DPR-RI akan menyelenggarakan *Parliamentary event on Millennium Development Goals (MDGs) Acceleration and Post-2015 Agenda*, yang akan diselenggarakan tanggal 10-11 September 2014 di Surabaya, dengan tema *Strengthening the Role of Asia-Pacific Parliaments on MDGs Acceleration and the Post 2015 Development Agenda*. Sidang ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 48 (empatpuluh delapan) parlemen dari kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan antar parlemen ini juga

dimaksudkan untuk memotret aspirasi parlemen negara-negara di Asia Pasifik atas pencapaian MDGs di Asia Pasifik, dan membuka ruang berbagi informasi dan praktik cerdas terkait pencapaian MDGs.

Masih dalam rangka Kepemimpinan DPR-RI di forum *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC), DPR-RI akan menyelenggarakan *Board of Meeting* dan *SEAPAC Workshop* dengan tema *Stronger Ethics and Integrity: Path for Parliament to Combat Corruption* di Jakarta tanggal 28—29 Agustus 2014. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Anggota *National Chapter Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) Indonesia dan Anggota SEAPAC lainnya dari negara-negara di Asia Tenggara. Workshop ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari Sidang Umum SEAPAC di Medan serta untuk membuka ruang dialog dan pengayaan isu-isu terbaru bidang korupsi, terutama Anggota *National Chapter* GOPAC Indonesia, serta Anggota SEAPAC yang hadir.

DPR-RI juga berperan aktif di forum Parlemen Regional dengan menghadiri Sidang Umum ke-35 AIPA yang akan

diselenggarakan di Vientiane, Laos pada tanggal 14 – 20 September 2014. Sidang ini dihadiri oleh 10 (sepuluh) Parlemen Anggota AIPA, Parlemen Peninjau, dan *Guest of the Host*. Sidang Umum ke-35 AIPA kali ini mengusung tema "*Strengthening Parliamentary Cooperation in the ASEAN Community Building*" dan membahas isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, organisasi, dan *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) serta topik-topik dialog dengan Negara Peninjau. Sidang Umum AIPA menjadi penting karena bertepatan dengan momentum Komunitas ASEAN 2015.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat*

DPR dan rakyat Indonesia benar-benar prihatin atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza Palestina. Serangan brutal Militer Israel telah menewaskan lebih dari 1.600 warga Palestina, dimana sebagian besar korban adalah penduduk sipil, wanita, anak-anak dan orang tua. Lebih dari 2.500 rumah hancur, tempat peribadatan,

sekolah-sekolah, bahkan sekolah yang dikelola PBB dimana terdapat 3.000 pengungsi Palestina. DPR dan seluruh rakyat Indonesia mengutuk setiap kekerasan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Indonesia mengharapkan dapat dicapai kesepakatan damai yang permanen dengan melibatkan PBB dan pihak-pihak lain yang terkait. Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina, oleh karena itu, Indonesia berkeinginan tercapainya perdamaian abadi di bumi Palestina.

Selain masalah Palestina, DPR-RI menaruh perhatian atas musibah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17 pada 17 Juli 2014 di wilayah timur Ukraina, yang menewaskan ratusan korban termasuk 12 (duabelas) korban warga negara Indonesia. Dewan menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap tragedi tersebut. Dewan menyerukan dan mendesak badan PBB agar investigasi secara internasional terus dilakukan, mengingat penembakan pesawat sipil oleh senjata militer merupakan pelanggaran hukum internasional.

*Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Pidato Presiden-RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Kepada Saudara Presiden kami persilahkan.

PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMBAWA ACARA:

Penyerahan RUU APBN TA 2015 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua DPR-RI, dan dilanjutkan penyerahan dari Ketua DPR-RI kepada Ketua DPD-RI.

KETUA DPR:

Demikianlah telah kita ikuti bersama Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 serta Nota Keuangan

dan Dokumen Pendukungnya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami mempersilahkan Saudara Dr. H Saifuddin Donodjoyo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Untuk membacakan doa.

DOA OLEH ANGGOTA DEWAN

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. H. Saifuddin Donodjoyo dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah membacakan doa, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita bersama. Amin.

Dengan telah selesainya Pidato Presiden dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPR siang dan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI dan seluruh hadirin yang telah memberikan waktu,

perhatian dan dukungan, sehingga acara ini telah berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobil'alamin*, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 saya nyatakan ditutup. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Ketok 3 kali

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD, meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Jakarta, 15 Agustus 2014

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE